

EVALUASI KINERJA ANGGARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2023

Putri Masita¹

Email: a0c022141@student.unram.ac.id

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Lukman Effendy²

Email: lukman.effendy@unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Adapun tujuan penyusunan Laporan Magang ini, adalah untuk mengetahui Evaluasi Kinerja Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Lombok Utara Tahun 2023. Tujuan ini dicapai dengan melakukan kegiatan Magang selama 4 (empat) bulan lamanya dengan melakukan aktivitas yang berkaitan pada bagian akuntansi untuk dapat mengetahui secara langsung tentang Evaluasi Kinerja Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Lombok Utara Tahun 2023 tersebut. Hasil yang didapatkan mampu menjelaskan tentang Evaluasi Kinerja Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) adalah proses untuk menilai eektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) kab. Lombok Utara. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran di gunakan secara optimal, sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah di tetapkan, serta memberikan hasil yang di harapkan seperti pencapaian sasaran, eektivitas dan efisiensi, kepatuhan terhadap aturan, transparansi dan akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan. Maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi tersebut penting untuk memastikan penggunaan anggaran, kepatuhan terhadap peraturan, serta transparansi dan akuntabilitas. Hasil evaluasi memberikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan, memastikan bahwa anggaran mendukung tujuan pembangunan daerah dengan optimal oleh Badan Perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara.

Kata Kunci: Evaluasi, Kinerja Anggaran, BAPPEDA

ABSTRACT

The purpose of compiling this Internship Report is to find out the Budget Performance Evaluation of the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of North Lombok Regency in 2023. This goal is achieved by conducting an Internship for 4 (four) months by carrying out activities related to the accounting section to be able to directly find out about the Budget Performance Evaluation of the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of North Lombok Regency in 2023. The results obtained are able to explain that the Budget Performance Evaluation of the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) is a process to assess the effectiveness and efficiency of the use of the budget allocated for regional development planning programs and activities (BAPPEDA) of North Lombok Regency. This evaluation aims to ensure that the budget is used optimally, in accordance with the plans and targets that have been set, and provide the expected results such as achieving targets, effectiveness and efficiency, compliance with regulations, transparency and accountability, and continuous improvement. So it can be concluded that the evaluation is important to ensure budget use, compliance with regulations, as well as transparency and accountability. The evaluation results provide a basis for continuous improvement,

ensuring that the budget optimally supports regional development goals, as determined by the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of North Lombok Regency.

Keywords: Evaluation, Budget Performance, BAPPEDA

PENDAHULUAN

Evaluasi anggaran adalah proses yang penting dalam manajemen keuangan yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran suatu organisasi. Proses ini melibatkan perbandingan antara anggaran yang telah direncanakan dan realisasi pelaksanaannya, sehingga dapat diidentifikasi penyimpangan yang terjadi. Dengan melakukan evaluasi, organisasi dapat mengukur kinerja dan akuntabilitas, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menghambat pencapaian tujuan anggaran. Evaluasi anggaran tidak hanya berfungsi untuk menilai hasil, tetapi juga memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan di masa mendatang. Dalam konteks pemerintahan, evaluasi anggaran sangat krusial untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara transparan dan akuntabel, serta untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Dengan demikian, evaluasi anggaran menjadi alat pengendali yang efektif dalam pengelolaan sumber daya keuangan dan pencapaian tujuan strategis organisasi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.

Salah satu tugas penting Bappeda adalah memastikan pengelolaan anggaran pembangunan berjalan efektif dan efisien. Kinerja anggaran memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan program pembangunan, seperti peningkatan infrastruktur, penguatan daya saing ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, permasalahan seperti penyerapan anggaran yang rendah, alokasi yang tidak sesuai prioritas, serta ketidak sesuaian antara perencanaan dan implementasi sering kali menjadi hambatan. Hal ini mengakibatkan tujuan pembangunan yang telah direncanakan tidak sepenuhnya tercapai, sehingga mengurangi dampak positif terhadap masyarakat.

Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu daerah yang menghadapi tantangan besar dalam pembangunan. Setelah gempa besar pada tahun 2018, kebutuhan akan perencanaan pembangunan yang berfokus pada pemulihan infrastruktur dasar, ketahanan bencana, dan peningkatan fasilitas publik menjadi semakin mendesak. Dalam konteks ini, Bappeda Kabupaten Lombok Utara memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa anggaran pembangunan digunakan secara optimal untuk mendukung pemulihan dan mempercepat pembangunan daerah. Kinerja anggaran yang baik sangat diperlukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang masih dalam proses pemulihan pascabencana.

Tahun 2023 menjadi momen yang signifikan untuk mengevaluasi kinerja anggaran di Kabupaten Lombok Utara. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana realisasi anggaran telah mendukung pencapaian target pembangunan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Isu-isu seperti rendahnya tingkat penyerapan anggaran, alokasi yang tidak tepat sasaran, serta hambatan koordinasi antar pihak terkait perlu dianalisis secara komprehensif untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan lebih baik ke depannya.

Selain itu, evaluasi anggaran juga penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya evaluasi, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa anggaran yang dikelola sesuai dengan prinsip efisiensi dan memberikan

manfaat maksimal bagi masyarakat. Di sisi lain, evaluasi ini juga dapat mengungkap potensi pemborosan atau inefisiensi yang masih terjadi, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di sektor perencanaan pembangunan.

Pengelolaan anggaran yang optimal juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ketika masyarakat melihat hasil nyata dari penggunaan anggaran pembangunan, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat. Sebaliknya, jika terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan hasil, atau jika anggaran tidak terserap dengan baik, hal ini dapat memicu ketidakpuasan yang berpotensi menghambat dukungan terhadap program pemerintah. Oleh karena itu, evaluasi kinerja anggaran tidak hanya bermanfaat untuk tujuan teknis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan politik yang signifikan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Magang ini adalah untuk mengevaluasi Kinerja Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023.

TINJAUAN LITERATUR

Evaluasi

Menurut Sukardi (2015:02) Evaluasi adalah proses mencari data atau informasi tentang objek atau subjek yang dilaksanakan untuk tujuan pengambilan keputusan. Proses ini melibatkan pengumpulan data yang sistematis untuk memahami bagaimana suatu program atau kegiatan berjalan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menentukan langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan efektivitas atau efisiensi pelaksanaannya.

Arikunto (2016:01) Menyatakan bahwa Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi, yang dimana informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Informasi yang dikumpulkan melalui evaluasi dapat mencakup data tentang proses, hasil, dan konteks dari suatu program atau kegiatan. Hasil evaluasi ini membantu pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan berbasis bukti.

Sedangkan menurut Lalu Stufflebeam dan Shinkfield, (2017: 04) Evaluasi adalah proses memperoleh informasi deskriptif dan penilaian tentang nilai serta kelebihan suatu objek untuk mendukung pengambilan keputusan. Proses ini juga bertujuan memenuhi kebutuhan akuntabilitas melalui analisis objektif. Selain itu, evaluasi membantu meningkatkan pemahaman fenomena terkait, sehingga mendukung perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi mencakup pengumpulan informasi tentang proses, hasil, dan konteks pelaksanaan suatu program untuk menentukan efektivitas dan efisiensinya. Selain itu, evaluasi berfungsi untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas, memberikan penilaian objektif terhadap berbagai aspek program, serta meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang terlibat, sehingga dapat mendukung perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Karakteristik Evaluasi

Menurut Sukardi, (2015:02) ada beberapa karakteristik dari evaluasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Sistematis :Evaluasi dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur dan terencana, melibatkan langkah-langkah yang jelas mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga pelaporan.

- b. Berbasis Bukti :Evaluasi didasarkan pada pengumpulan bukti atau data yang valid dan reliabel, yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian terhadap suatu program atau kegiatan.
- c. Berorientasi pada Tujuan :Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan program atau kegiatan telah tercapai, serta menganalisis efektivitasnya.
- d. Bermanfaat untuk Pengambilan Keputusan :Hasil evaluasi memberikan informasi yang relevan dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk membuat keputusan terkait perbaikan, keberlanjutan, atau perubahan program.
- e. Adaptif terhadap Konteks :Evaluasi memperhitungkan konteks sosial, budaya, dan lingkungan di mana program berlangsung, sehingga menghasilkan rekomendasi yang relevan dan aplikatif.
- f. Komprehensif :Evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga mencakup proses, masukan, dan lingkungan yang memengaruhi keberhasilan program.

Manfaat Evaluasi

Berikut ini adalah beberapa manfaat evaluasi menurut Arikunto, (2016: 01), di antaranya sebagai berikut:

- a. Menilai Kualitas atau Nilai Program :Evaluasi membantu menentukan apakah suatu program, kebijakan, atau proyek memiliki kualitas yang memadai atau mencapai nilai tertentu berdasarkan standar yang telah ditentukan.
- b. Mendukung Proses Pengambilan Keputusan :Hasil evaluasi memberikan informasi yang relevan untuk membantu pemangku kepentingan membuat keputusan strategis, seperti melanjutkan, menghentikan, atau memodifikasi program.
- c. Memahami Dampak Program :Evaluasi memberikan wawasan tentang sejauh mana program memberikan dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap peserta atau masyarakat yang menjadi sasaran.
- d. Meningkatkan Keberlanjutan Program :Dengan mengevaluasi efektivitas program, organisasi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang mendukung atau menghambat keberlanjutan program, sehingga dapat merancang strategi untuk perbaikan.
- e. Meningkatkan Akuntabilitas :Evaluasi memberikan bukti yang mendukung transparansi dan akuntabilitas program terhadap para pemangku kepentingan, termasuk donor, pemerintah, atau masyarakat.
- f. Memberikan Rekomendasi untuk Perbaikan :Evaluasi menghasilkan temuan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan program, memperbaiki kelemahan, dan meningkatkan efektivitas di masa depan.

Anggaran

Menurut Sasongko dan Parulian (2015), Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Dalam konteks pemerintahan, anggaran mencakup rencana, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang, serta merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Anggaran berfungsi sebagai pedoman tindakan untuk mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberikan dasar bagi perolehan pendapatan serta pembiayaan. Anggaran ini berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, koordinasi, dan pengendalian aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan menyusun anggaran, perusahaan dapat memprediksi tingkat aktivitas masa depan, mengurangi ketidakpastian, serta memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antarbagian organisasi untuk memaksimalkan efektivitas penggunaan sumber daya. Seperti yang di nyatakan.

Menurut Sasongko dan Parulian (2015), tujuan dan fungsi anggaran yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai alat perencanaan: Anggaran berfungsi untuk merencanakan kegiatan organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara sistematis.
- b. Sebagai alat pengendalian: Anggaran digunakan untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan hasil aktual dengan rencana yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan.
- c. Sebagai alat koordinasi: Anggaran membantu menyelaraskan berbagai aktivitas dan unit kerja dalam organisasi sehingga tercipta sinergi untuk mencapai tujuan bersama.
- d. Sebagai alat evaluasi kinerja: Anggaran menjadi tolok ukur untuk menilai keberhasilan kinerja individu, unit kerja, atau organisasi secara keseluruhan.
- e. Sebagai pedoman operasional: Anggaran memberikan panduan bagi pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari dalam organisasi.
- f. Sebagai dasar pengambilan keputusan: Anggaran menyediakan informasi keuangan yang relevan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis.
- g. Sebagai alat komunikasi: Anggaran menjadi media untuk menyampaikan prioritas dan rencana organisasi kepada seluruh pihak yang terlibat.
- h. Sebagai pengendalian keuangan: Anggaran memastikan penggunaan sumber daya keuangan dilakukan secara efisien dan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Melalui tujuan dan fungsi tersebut, anggaran tidak hanya menjadi dokumen keuangan, tetapi juga alat manajemen strategis yang mendukung efektivitas dan efisiensi organisasi.

Macam-Macam Anggaran

Menurut Budhi & Jamaluddin (2020) dalam penelitian mereka membahas berbagai jenis anggaran yang digunakan dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah. Berikut adalah beberapa jenis anggaran yang diidentifikasi yaitu sebagai berikut;

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Ini adalah anggaran utama yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pendapatan serta pengeluaran.
- b. Anggaran Kegiatan: Merupakan anggaran yang lebih spesifik, ditujukan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tertentu dalam program-program yang telah direncanakan.
- c. Anggaran Proyek: Dikhususkan untuk mendanai proyek-proyek tertentu, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.
- d. Anggaran Operasional: Ini mencakup semua biaya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi sehari-hari dari suatu instansi atau organisasi.
- e. Anggaran Investasi: Digunakan untuk mendanai investasi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur.
- f. Anggaran Sumber Daya Manusia (SDM): Ini mencakup anggaran untuk pengembangan dan pelatihan pegawai, serta biaya terkait dengan rekrutmen dan pemeliharaan karyawan.

Kinerja Anggaran

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Menyatakan Kinerja anggaran adalah ukuran efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perspektif teori keuangan publik, kinerja anggaran

mencerminkan bagaimana suatu organisasi, baik itu pemerintah, perusahaan, maupun lembaga non-profit, mampu mengelola anggaran dengan mematuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Teori ini menekankan bahwa pengelolaan anggaran yang baik tidak hanya berorientasi pada realisasi belanja, tetapi juga pada pencapaian hasil yang direncanakan, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat atau pencapaian target strategis organisasi.

Secara konseptual, kinerja anggaran dapat dijelaskan melalui pendekatan pengelolaan berbasis hasil (*performance-based budgeting*). Pendekatan ini mengaitkan alokasi anggaran dengan kinerja organisasi dalam mencapai indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Mardiasmo (2018), anggaran tidak hanya dipandang sebagai alat distribusi dana, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan bahwa setiap unit kerja bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai. Dengan demikian, indikator kinerja yang jelas, seperti efisiensi operasional, efektivitas program, dan dampak jangka panjang, menjadi elemen utama dalam evaluasi kinerja anggaran.

Menurut Prayudi, (2018) Penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki beberapa tujuan utama yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan publik dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. yaitu sbb:

- a. Memperoleh manfaat maksimal dari penggunaan sumber daya terbatas.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya.
- c. Memperkuat proses pengambilan keputusan terkait kebijakan dalam jangka menengah

Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Menurut Mahmudi (2020) Anggaran dan realisasi belanja dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah mencakup konsep perencanaan, pengalokasian, dan penggunaan dana publik secara efisien dan efektif. Anggaran merupakan instrumen penting untuk menerjemahkan rencana strategis organisasi ke dalam bentuk numerik, dengan tujuan memastikan penggunaan sumber daya yang sesuai dengan prioritas pembangunan. Sementara itu, realisasi belanja mengacu pada pelaksanaan anggaran yang telah disusun, yang mencerminkan seberapa baik rencana anggaran tersebut dapat di implementasikan dalam praktik.

Dalam teori ini, terdapat prinsip-prinsip penting seperti akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi yang harus diutamakan. Akuntabilitas berarti setiap pengeluaran dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan, sementara transparansi memastikan bahwa proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran dapat diawasi oleh publik. Efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.

Mahmudi (2020), juga menekankan bahwa kesenjangan antara anggaran dan realisasi belanja sering kali mencerminkan adanya tantangan dalam perencanaan, koordinasi, dan pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, hubungan antara anggaran dan realisasi belanja tidak hanya menjadi indikator kinerja fiskal, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola organisasi. Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan sistem pengendalian internal yang kuat, pengawasan yang efektif, serta pemantauan kinerja secara berkala agar anggaran dapat direalisasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

METODE

Laporan magang ini dalam bentuk deskriptif. Sebelum melaksanakan kegiatan Magang, penulis terlebih dahulu melakukan survey pada lokasi magang yang bertujuan untuk memastikan apakah kantor tersebut bersedia menerima penulis untuk melaksanakan magang sesuai periode yang penulis ajukan, serta mengetahui objek apa saja yang ada di lokasi tersebut. Kegiatan Magang ini dilakukan selama 4 (empat) bulan, terhitung tanggal 6 Agustus

2023 sampai dengan 6 Desember 2024. Waktu kegiatan Magang ini dilaksanakan harian disesuaikan dengan jam kerja yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu dimulai sejak pukul 07.30-16.00 pada hari Senin sampai Kamis, sedangkan pada hari Jumat diakhir dimulai pada pukul 07.30- 16.30.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis saat melaksanakan kegiatan magang, yaitu sebagai berikut :

1. Penulis beradaptasi untuk membantu dalam Pelaksanaan pekerjaan pada BAPPEDA.
2. Pihak BAPPEDA memberikan penjelasan tentang sistem dan wab yang digunakan untuk penginputan data realisasi dan anggaran.
3. Pihak BAPPEDA memberikan penjelasan tentang program BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembanguna Daerah).
4. Penulis beradaptasi untuk membantu mengimput data realisasi anggaran ke situs web yang ada di BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembanguna Daerah).
5. Penulis diperkenalkan dan dijelaskan macam-macam aplikasi yang ada di BAPPEDA untuk penginputan data.
6. Penulis mengkoreksi kembali setiap data yang sudah di upload ke web.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Riancian Perbandingan anggaran dan realisasi 2023

Kategori	Anggaran	Realisasi	Selisih	Persentase Realisasi
Belanja Operasi	Rp10.642.932.719,00	Rp10.299.479.172,00	Rp343.453.547,00	96,77%
- Belanja Pegawai	Rp4.498.283.925,00	Rp4.412.159.289,00	Rp86.124.636,00	98,09%
- Belanja Barang dan Jasa	Rp6.144.648.794,00	Rp5.887.319.883,00	Rp257.328.911,00	95,81%
Belanja Modal	Rp256.662.200,00	Rp256.072.200,00	Rp590.000,00	99,77%

Sumber: LRA di olah 2024

Belanja Operasi memiliki Selisih sebesar Rp343.453.547,00 dengan presentase realisasi 96,77%. menunjukkan bahwa pengeluaran tidak sepenuhnya mencapai anggaran yang ditetapkan, Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti penghematan dalam penggunaan sumber daya operasional dan realokasi anggaran yang tidak terserap secara maksimal. Penghematan ini mungkin berasal dari pengendalian belanja yang lebih ketat, penundaan kegiatan tertentu, atau efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa.

Sedangkan belanja pegawai memiliki Selisih sebesar Rp86.124.636,00 dengan presentase realisasi 98,09%. Penyebab belanja pegawai memiliki selisih sebesar itu di karena adanya pegawai yang tidak mengklaim hak keuangan mereka tepat waktu, seperti tunjangan atau insentif, atau pengisian posisi kosong yang tidak sesuai rencana. Selain itu, kebijakan efisiensi dalam pemberian fasilitas atau pembayaran gaji pegawai honorer juga dapat berkontribusi.

Pada Belanja Barang dan Jasa terdapat selisih sebesar Rp257.328.911,00 dengan presentase realisasi 95,81%. penyebab utama dari selisih ini terjadi karna adanya penghematan yang dihasilkan dari optimalisasi pengadaan barang dan jasa. Misalnya, harga

barang dan jasa yang lebih rendah dari perkiraan anggaran, perubahan kebutuhan operasional, atau efisiensi dalam pelaksanaan program kerja. Beberapa kegiatan mungkin juga tertunda, sehingga anggaran yang di keluarkan tidak terealisasi semua.

Belanja Modal memiliki selisih kecil sebesar Rp590.000,00 dengan presentase realisasi 99,77%. menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran belanja modal berhasil direalisasikan sesuai rencana. Selisih ini mungkin disebabkan oleh penyesuaian harga kontrak atau pengeluaran yang lebih rendah dari estimasi awal untuk pembelian aset atau pembangunan fisik, Sehingga Belanja Modal menunjukkan pengelolaan anggaran yang sangat efisien.

Cara perhitungan selisi

Anggaran-Realisasi=Selisih

➤ **Belanja Operasi Total**

- Anggaran: Rp. 642.932.719,00
- Realisasi: Rp10.299.479.172,00
- Selisih: $Rp10.642.932.719,00 - Rp10.299.479.172,00 = Rp343.453.547,00$

➤ **Belanja Pegawai**

- Anggaran: Rp4.498.283.925,00
- Realisasi: Rp4.412.159.289,00
- Selisih: $Rp4.498.283.925,00 - Rp4.412.159.289,00 = Rp86.124.636,00$

➤ **Belanja Barang dan Jasa**

- Anggaran: Rp6.144.648.794,00
- Realisasi: Rp5.887.319.883,00
- Selisih: $Rp6.144.648.794,00 - Rp5.887.319.883,00 = Rp257.328.911,00$

➤ **Belanja Modal**

- Anggaran: Rp256.662.200,00
- Realisasi: Rp256.072.200,00
- Selisih: $Rp256.662.200,00 - Rp256.072.200,00 = Rp590.000,00$

BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi dengan persentase keseluruhan mencapai 154,78%. Capaian ini mencerminkan efektivitas dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Nilai SAKIP (Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah) komponen perencanaan yang mencapai 22,03 dari bobot 30 menunjukkan bahwa proses perencanaan telah dilakukan secara matang dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peningkatan kualitas inovasi daerah dengan capaian 167,41% merupakan indikator bahwa Bappeda tidak hanya berfokus pada rutinitas tetapi juga berupaya menghadirkan solusi-solusi baru yang dapat mengatasi tantangan pembangunan. Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Utara siap untuk beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan teknologi serta ide-ide baru untuk kemajuan daerah.

Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023 Bappeda Kabupaten Lombok Utara memperoleh alokasi anggaran berdasarkan perubahan anggaran tahun 2023 sebesar Rp10.899.594.919,00 (Sepuluh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah), selanjutnya terealisasi sebesar Rp10.555.551.372,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau 96,84%, dengan rincian terdiri atas:

1. Belanja Operasi yang memiliki anggaran sebesar Rp10.642.932.719,00 dan realisasi sebesar Rp10.299.479.172,00 atau 96,77%. Anggaran dan realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut:

- a) Belanja pegawai memiliki anggaran sebesar Rp4.498.283.925,00 dengan realisasi sebesar Rp4.412.159.289,00 atau 98,09%;
- b) Belanja barang dan jasa memiliki anggaran sebesar Rp6.144.648.794,00 dengan realisasi sebesar Rp5.887.319.883,00 atau 95,81%.
2. Belanja Modal pada APBD Bappeda Kabupaten Lombok Utara terdapat anggaran sebesar Rp256.662.200,00 dan realisasi sebesar Rp256.072.200,00 atau 99,77%.

Keseluruhan belanja tersebut digunakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran renstra Bappeda Kab. Lombok Utara sebagai pengampu urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada saat pelaksanaan magang dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan. Evaluasi kinerja anggaran BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023. Secara umum capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara pada Tahun 2023 masuk dalam kategori Sangat Tinggi dengan capaian kinerja sebesar 154,78%. Namun terdapat rincian terhadap selisih pada beberapa kategori. Belanja Operasi dengan realisasi 96,77% mencerminkan penghematan yang dihasilkan dari efisiensi pengadaan barang dan jasa serta realokasi anggaran yang tidak sepenuhnya terserap. Belanja Pegawai terealisasi sebesar 98,09%, dengan selisih yang disebabkan oleh penundaan klaim hak keuangan atau pengisian posisi kosong yang tidak sesuai rencana. Pada Belanja Barang dan Jasa, realisasi sebesar 95,81% menunjukkan optimalisasi dalam pengadaan dan pelaksanaan kegiatan operasional. Sementara itu, Belanja Modal dengan realisasi 99,77% menunjukkan hampir seluruh anggaran berhasil digunakan secara efisien, dengan selisih yang sangat kecil akibat penyesuaian harga atau efisiensi pengeluaran. Secara umum, realisasi anggaran ini mencerminkan pengelolaan yang baik, dengan penghematan dan efisiensi yang signifikan tanpa mengorbankan pencapaian tujuan program kerja.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran di BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara:

1. Optimalisasi Penggunaan Anggaran Operasi
Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, perlu dilakukan perencanaan yang lebih detail terkait kebutuhan operasional. Mengidentifikasi potensi efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan dan memastikan realokasi anggaran dilakukan untuk kegiatan yang lebih prioritas dapat meminimalkan selisih.
2. Pengelolaan Belanja Pegawai yang Lebih Efisien
Pemerintah perlu mempercepat proses klaim hak keuangan pegawai, seperti tunjangan atau insentif, melalui sistem administrasi yang lebih terintegrasi. Selain itu, evaluasi kebijakan pengisian posisi kosong dapat membantu memastikan alokasi anggaran pegawai sesuai kebutuhan riil.
3. Peningkatan Akurasi Perencanaan dan Eksekusi Belanja Modal
Meskipun realisasi belanja modal sangat baik, akurasi estimasi harga dan jadwal pelaksanaan dapat terus ditingkatkan. Melakukan review rutin terhadap proses pengadaan aset dan pembangunan fisik akan membantu mengurangi risiko selisih anggaran, meskipun kecil, serta menjaga efisiensi di masa mendatang.

REFERENSI

- Anonim, “Buku Petunjuk Pedoman Magang”, 2024, Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram.
- Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). 2023. LKJIP, 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.
- Budhi & Jamaluddin. (2020). Bentuk Dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.146-157>
- Mahmudi. (2020). *Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Dan Rasio Keuangan Di Kantor Kecamatan Gedeg Periode 2017-2021*. 3(4).
- Mardiasmo. (2018). *Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintah*. 7(1), 498–504.
<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB/article/viewFile/26165/8710>
- Prayudi. (2018). Anggaran berbasis kinerja. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 44.
- Sasongko dan Parulian. (2015). *Penganggaran sebuah perusahaan*. Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local. <https://repository.stie-mce.ac.id/1201/3/3>. Bab II Tinjauan Pustaka.pdf
- Sukardi. (2015). *Pengertian evaluasi*. Republika.